

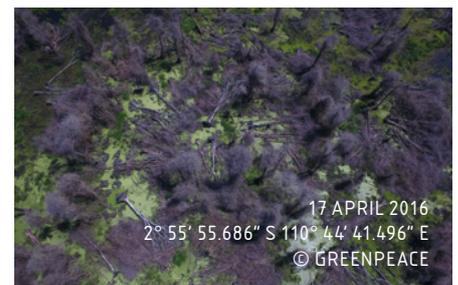
GREENPEACE

KEJAHATAN PERDAGANGAN

BIAYA KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN DI RANTAI PASOK IOI

Ringkasan Laporan Greenpeace Internasional, 27 September 2016

PENGANTAR



BIAYA KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN DARI EKSPANSI KELAPA SAWIT

Selama dua dekade terakhir, sektor perkebunan telah merusak hutan dan lahan gambut di Indonesia. Jutaan hektar telah hancur demi konsesi pulp dan kelapa sawit yang berdampak besar terhadap satwa liar, iklim dan manusia.

Pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut untuk perkebunan juga telah meningkatkan risiko kebakaran lebih dari sebelumnya. Sebuah studi dari Universitas Harvard dan Columbia yang diterbitkan pekan lalu, memperkirakan bahwa pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang dewasa di kawasan Asia Tenggara mengalami kematian dini akibat polusi dari asap pembakaran hutan dan lahan gambut. Bank Dunia memperkirakan biaya dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 mencapai US\$16 miliar atau dua kali lebih besar dari perkiraan kontribusi ekonomi dari ekspor bruto minyak sawit Indonesia pada tahun 2014.

Lalu siapa yang harus disalahkan? Dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan? Jelas, bahwa perusahaan kelapa sawit memiliki jawabannya: karena pembukaan besar-besaran dan pengeringan lahan gambut yang menjadikan kondisi terjadinya kebakaran tak terkendali ini, terlepas dari siapa atau apa yang memantik api.

IOI MENANAM, MEMPROSES DAN MEMPERDAGANGKAN PRODUK MINYAK SAWIT MILIK SENDIRI DAN PIHAK KETIGA

Berkantor pusat di Malaysia, Grup IOI diperkirakan merupakan perusahaan kelapa sawit ketiga terbesar di dunia. Perusahaan ini adalah pengelola perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi secara vertikal; memproses tandan buah segar (TBS) dari perkebunannya sendiri dan dari perusahaan lain menjadi minyak sawit mentah dan minyak inti sawit (palm kernel oil); serta memproduksi turunan kelapa sawit. Perusahaan ini berdagang minyak sawit dan turunannya ke seluruh dunia. IOI Loders Crocklaan adalah anak perusahaan yang berfokus pada bisnis hilirnya.

IOI adalah salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional, tetapi hanya sekitar sepertiga dari minyak sawit IOI Loders Crocklaan berasal dari pabrik pengolah IOI sendiri di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015. Sebagian besar dari 800 pabrik pengolah dalam basis pasokan IOI, memasok secara tidak langsung melalui pedagang minyak sawit lainnya. Ini artinya tindakan yang diambil para pedagang ini memiliki pengaruh besar terhadap 'berkelanjutan' atau tidaknya minyak sawit IOI ini.



“Krisis ekonomi dan lingkungan yang luas ini kerap berulang dari tahun ke tahun, dengan seratusan perusahaan dan petani meraup keuntungan dari praktik spekulasi lahan dan perkebunan sementara puluhan juta masyarakat Indonesia menderita masalah kesehatan dan gangguan ekonomi.”

Bank Dunia (2016) ‘Ongkos yang ditimbulkan kebakaran: Sebuah analisis ekonomi terhadap krisis kebakaran Indonesia tahun 2015’
Catatan Pengetahuan Lansekap Berkelanjutan Indonesia: 1 Februari 2016

24 OCTOBER 2015
© RANTE/GREENPEACE

IOI DALAM KEPUNGAN API

Greenpeace Internasional pertama kali mengangkat masalah perkebunan IOI Group di Kalimantan pada tahun 2008. Pada tahun-tahun berikutnya, IOI mengeluarkan serangkaian komitmen untuk melindungi lahan gambut dan hutan, termasuk pada bulan Desember 2014 dengan dikeluarkannya ‘Pernyataan Kebijakan Keberlanjutan’, yang juga berlaku untuk pemasok pihak ketiga. Namun penyelidikan terus menunjukkan pelanggaran komitmen kebijakan kelompok ini, bahkan di dalam konsesi mereka sendiri.

Pada bulan April 2016, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menangguhkan keanggotaan IOI setelah menerima komplain dari konsultan nirlaba Aidenvironment mengenai pembukaan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCV) dan hutan lahan gambut di konsesi IOI di Ketapang, Kalimantan Barat.

Namun, setelah melakukan pengujian ala kadarnya, panel komplain RSPO menarik kembali keputusan penangguhan

keanggotaan IOI tersebut pada bulan Agustus 2016 tanpa bukti terjadinya perubahan mendasar yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan di konsesi IOI di Ketapang. IOI Group mengumumkan ‘Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan’ yang telah direvisi, setelah keputusan penangguhan RSPO terbukti gagal menyelesaikan atau cukup mengurangi risiko deforestasi, pengeringan lahan gambut, kebakaran dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan IOI. Terlebih lagi, kebijakan tersebut tidak memasukkan rencana komprehensif untuk memastikan pemasok pihak ketiga IOI ini berhenti membuka hutan dan lahan gambut.

Di luar kebijakan di atas kertas tersebut, terdapat kegagalan yang konsisten dari IOI untuk memastikan kepatuhan terhadap janji-janji keberlanjutan baik dalam operasi mereka sendiri atau, seperti dipaparkan laporan ini, maupun oleh pemasok pihak ketiganya.

PELANGGARAN KEBIJAKAN DALAM RANTAI PASOKAN PIHAK KETIGA IOI

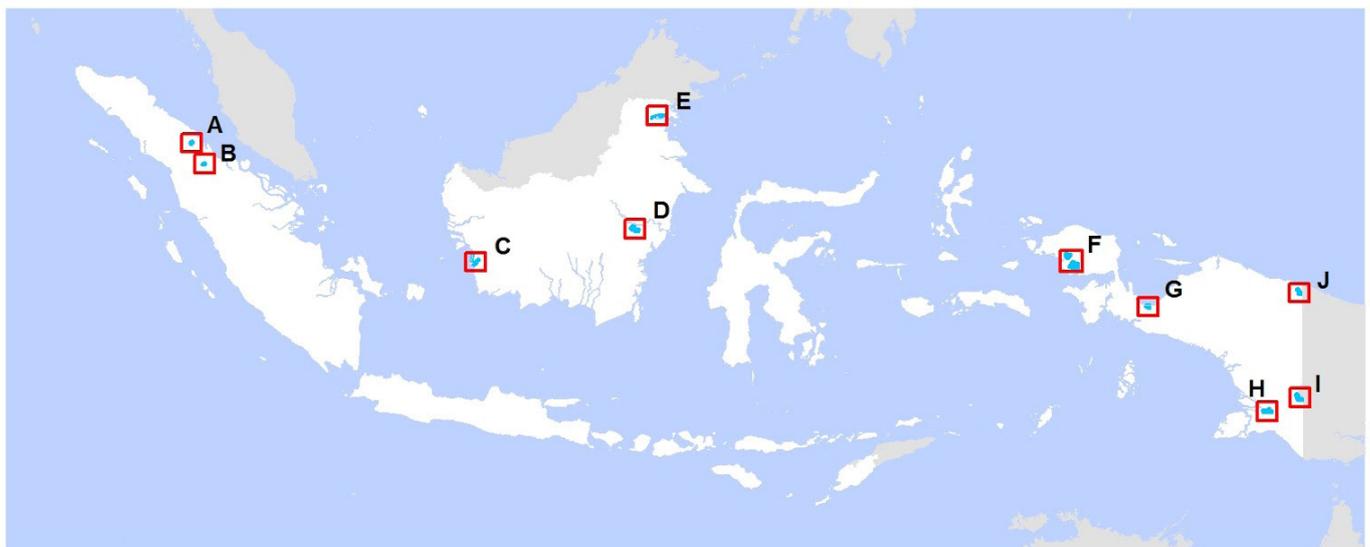
Greenpeace Internasional menganalisis data pasokan dari IOI sendiri, peta konsesi terbaik yang tersedia yang dapat diakses seperti platform online Greenpeace 'Kepo Hutan', peringatan deforestasi, data titik kebakaran NASA, laporan publik dan laporan komplain Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) resmi. Bukti menunjukkan bahwa IOI Group terus membeli minyak sawit dari pemasok pihak ketiga yang terkait secara serius dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut data pasokan IOI yang baru diterbitkan, minyak kelapa sawit dari kelompok-kelompok ini diekspor ke Eropa dan Amerika Utara antara triwulan kedua 2015 dan triwulan pertama 2016.

Kelompok-kelompok yang memasok IOI dengan minyak kelapa sawit diketahui terlibat dalam berbagai kegiatan yang melanggar 'Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan' IOI, termasuk:

- Pembukaan hutan, termasuk hutan primer di Papua dan Kalimantan
- Pengembangan di atas lahan gambut
- Kebakaran yang tidak terkendali dan terbukti sengaja menggunakan api untuk pembukaan lahan
- Eksploitasi pekerja, termasuk tuduhan mempekerjakan anak-anak
- Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penggunaan aparat keamanan negara, serta mengembangkan lahan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan masyarakat setempat

Mengingat bahwa Greenpeace melakukan ulasan ini menggunakan informasi publik yang tersedia, IOI sendiri seharusnya menyadari pelanggaran ini. Dalam beberapa kasus, tuduhan kesalahan oleh kelompok pemasok, pertama kali dilakukan lebih dari lima tahun yang lalu. Tuduhan lainnya dibuat baru-baru ini April 2016. Namun, setiap kali laporan di publikasi, IOI tetap saja membeli dari perusahaan tersebut, atau hanya berhenti membelinya ketika pelanggaran diumumkan secara terbuka oleh organisasi non-pemerintah. Mengingat klaim IOI akan adanya program aktif pemantauan pemasok, IOI perlu menjelaskan apakah mereka mencari di lokasi yang salah, atau mengabaikan masalah yang ditemukan.

Banyak dari perusahaan tersebut adalah anggota RSPO. Hal ini menimbulkan lebih banyak lagi pertanyaan tentang peran RSPO dalam menghentikan penghancuran hutan hujan Indonesia. Hal ini juga merupakan pengingat jelas bahwa keanggotaan RSPO bukanlah jaminan praktik keberlanjutan, atau bahwa suatu perusahaan mematuhi kebijakan 'non-deforestasi'.



 Concessions in case studies

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>A PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk: Gunung Malayu Estate</p> <p>B PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk: Sei Rumbiya Estate</p> <p>C PT. Arrtu Energie Resources</p> | <p>D PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk: - Kedang Estate - Pahu Estate - Issuy Estate</p> <p>E PT. Persada Kencana Prima</p> | <p>F 1. PT. Permata Putera Mandiri - Blok I and II
2. PT. Putera Manunggal Perkasa
3. PT. Varia Mitra Andalan</p> <p>G PT. Nabire Baru</p> <p>H PT. Dongin Prabhawa</p> | <p>I PT. Papua Agro Lestari</p> <p>J PT. Tandan Sawita Papua</p> |
|---|---|--|--|

KELOMPOK 1: AUSTINDO NUSANTARA JAYA (INDONESIA, ANGGOTA RSPO)



PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** penghancuran hutan primer di Papua (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, Papua Barat)
- **Eksplorasi:** sengketa lahan, tidak adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan masyarakat lokal (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa, Papua Barat)

ANJ Group adalah sebuah perusahaan Indonesia milik keluarga yang memiliki empat perkebunan usia panen di Sumatera dan Kalimantan Barat. Penanaman juga telah dimulai di dua perkebunan di provinsi Papua Barat (PT Permata Putera Mandiri dan PT Putera Manunggal Perkasa) dan di Sumatera Selatan (PT Galempa Sejahtera Bersama), tetapi perkebunan ini belum memproduksi tandan buah segar. Perusahaan juga memiliki konsesi ketiga di Papua, PT Pusaka Agro Makmur, yang belum dikembangkan.

IOI membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik ANJ di Sumatera melalui AAA/Apical, GAR, Musim Mas, Wilmar.

STUDI KASUS: PT PERMATA PUTERA MANDIRI DAN PT PUTERA MANUNGGAL PERKASA, PAPUA

ANJ mulai membuka hutan di konsesi-konsesinya di Papua pada tahun 2013/2014. Peta tutupan lahan KLHK yang tersedia melalui Kepo Hutan menunjukkan bahwa area konsesi hampir seluruhnya ditutupi dengan hutan pada tahun 2012 yang sebagian besar merupakan hutan primer.

Pekerjaan di kedua konsesi ini dimulai sebelum diajukannya konsultasi publik pada Prosedur Penanaman Baru RSPO. Bulan Mei 2015 LSM Indonesia Greenomics menerbitkan laporan yang menyoroti hal ini. ANJ mengakui telah melanggar prosedur RSPO dan mengatakan akan menghentikan kegiatan pada dua perkebunan sampai kondisi Prosedur Penanaman Baru dipenuhi.

Karena pekerjaan telah dimulai di dua perkebunan ANJ di Papua, sejumlah sengketa lahan juga telah muncul yang melibatkan kelompok masyarakat adat setempat. Beberapa demonstrasi dilakukan oleh masyarakat menentang PT Permata Putera Mandiri sepanjang tahun 2015. Puluhan orang ditangkap dalam satu aksi yang berlangsung pada 15 Mei 2015, dan dua orang kemudian dipenjarakan selama beberapa bulan karena kerusakan properti. Secara terpisah, dua pemimpin dari Desa Benawa dan Anuni dilaporkan ditangkap setelah melakukan protes menentang PT Putera Manunggal Perkasa, dan mendekam di tahanan polisi menunggu pengadilan setidaknya selama delapan bulan.



PERNYATAAN IOI

'[ANJ] sudah dilaporkan dalam daftar komplain pemasok ketiga yang diawasi oleh departemen keberlanjutan kami. Kami juga telah meminta perkembangan informasi terbaru dari pihak pemasok kami terkait dengan itu.'

PERNYATAAN PEDAGANG

Dalam email kepada Greenpeace pada bulan September 2016, semua pedagang Golden Agri-Resources, Musim Mas dan Wilmar menegaskan bahwa mereka telah berhenti berdagang dengan ANJ pada tahun 2015.

PERNYATAAN PERUSAHAAN

ANJ memastikan kepada Greenpeace bahwa mereka telah secara tidak sengaja membuka hutan primer dan telah menetapkan 'moratorium mandiri' sampai penelitian yang lebih rinci dilakukan. Perusahaan saat ini sedang melakukan studi lanskap rinci di Papua Barat untuk mengidentifikasi gambut: studi ini juga akan mengidentifikasi "kebutuhan pembangunan ekonomi" di Papua Barat. Berkaitan dengan FPIC, perusahaan tidak mengakui bahwa pembebasan lahan tidak memenuhi standar FPIC, tapi proses rinci FPIC sedang berlangsung dan pertemuan pemangku kepentingan di Papua Barat, perusahaan menyebutnya sebagai 'kasus khusus pembangunan'.

KELOMPOK 2: EAGLE HIGH / RAJAWALI (INDONESIA, ANGGOTA RSPO)



20 SEPTEMBER 2015
© GREENPEACE

PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** peringatan deforestasi satelit menunjukkan hilangnya hutan sejak awal tahun 2015 (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat; deforestasi juga terjadi di PT Varia Mitra Andalan, Papua Barat)
- **Gambut:** pengembangan konsesi di atas gambut (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat)
- **Kebakaran:** Kebakaran meluas menimbulkan pertanyaan tentang salah urus yang disengaja atau lalai (PT Arrtu Energie Resources, Kalimantan Barat)
- **Eksplorasi:** penggunaan kekuatan yang berlebihan, penggunaan aparat keamanan negara dan pekerja anak (PT Tandan Sawita Papua, Papua)

PT Eagle High Plantations Tbk yang berbasis di Jakarta adalah perkebunan anak perusahaan dari Grup Rajawali. Perusahaan ini berbentuk seperti sekarang sejak tahun 2014 ketika PT BW Plantation Tbk mengambil alih Green Eagle Group, melipat gandakan kepemilikan lahannya kira-kira tiga kali lipat.

Pada 2014, Eagle High mengendalikan sekitar 425.000ha di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera, dengan luas wilayah tertanam 156.357ha pada tahun 2015. Lebih dari 90% dari kawasan tertanam berada di Kalimantan. Laporan tahunan 2015 mencakup 32 anak perusahaan perkebunan sawit, dengan 6 pabrik pengolahan.

IOI dilaporkan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik Eagle High di Kalimantan Tengah melalui Wilmar untuk kilang di Amerika dan melalui GAR untuk kilang di Belanda. IOI juga membeli dari pabrik milik Rajawali di Kalimantan Timur melalui Wilmar dan GAR untuk kilang di Amerika dan Belanda.

STUDI KASUS: ARRTU ENERGIE RESOURCES (2 KONSESI), KALIMANTAN BARAT

Dua konsesi PT Arrtu Energie Resources (AER) berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Palung di Ketapang, Kalimantan Barat – tempat tinggal salah satu populasi Orangutan terbesar dan terpadat di Kalimantan. Konsesi meliputi sekitar 11.000 hektar gambut. Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan hilangnya hutan di kedua konsesi antara tahun 2011 dan 2013. Peringatan deforestasi berbasis satelit menunjukkan berkurangnya tutupan vegetasi dalam konsesi-konsesi ini sejak awal 2015, termasuk di daerah gambut.

Pada 2015, Greenpeace mendokumentasikan kebakaran tak terkendali di konsesi AER.

STUDI KASUS: TANDAN SAWITA PAPUA, PAPUA

Konsesi PT Tandan Sawita Papua seluas 18.000ha, hampir seluruhnya hutan pada tahun 2009, termasuk hutan primer, menurut peta tutupan lahan KLHK. Perusahaan telah membuka sebagian besar hutan di konsesi ini pada tahun 2014. Dilaporkan bahwa terdapat anak-anak paling muda berumur sekitar enam tahun bekerja di perkebunan untuk membantu orang tua mereka. Pada April 2014 dua karyawan dipenjarakan setelah menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Satuan tugas keamanan negara untuk pengawasan perbatasan Indonesia tampaknya ditugaskan sebagai penjaga perkebunan, dan terlibat dalam penembakan fatal seorang karyawan perusahaan pada Desember 2015.

STUDI KASUS: VARIA MITRA ANDALAN, PAPUA BARAT

Analisis pemetaan Kepo Hutan menunjukkan konsesi PT Varia Mitra Andalan ini hampir seluruhnya ditutupi hutan sekunder pada tahun 2013, menurut peta tutupan lahan KLHK, sebelum kegiatan perkebunan dimulai pada tahun 2014.

Citra satelit menunjukkan bahwa PT Varia Mitra Andalan membuka hutan seluas sekitar 1.000ha pada 2015. Mayoritas konsesi tetap berhutan.

PERNYATAAN IOI

‘Berdasarkan informasi yang disediakan Greenpeace, kami sudah menghubungi pemasok ketiga dan meminta secepatnya perkembangan informasi terkait dengan tuduhan ini. Beberapa pemasok sudah menyediakan informasi bagaimana mereka berurusan dengan [Eagle High].’

PERNYATAAN PEDAGANG

Dalam email kepada Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, Wilmar dan GAR menegaskan bahwa mereka masih memiliki hubungan komersial dengan Eagle High.

PERNYATAAN PERUSAHAAN

Greenpeace menghubungi Eagle High untuk memberikan pernyataan sebelum publikasi: hingga saat publikasi, Greenpeace belum menerima tanggapan perusahaan.



20 SEPTEMBER 2015
1°37'20.21"S 110°3'29.65"E
© IFANSASTI/GREENPEACE

KELOMPOK 3: GOODHOPE / CARSON CUMBERBATCH (SRI LANKA / SINGAPURA, ANGGOTA RSPO)



Carson Cumberbatch PLC



SEPTEMBER 2013
© YERISIAM

PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** pembukaan hutan primer di Papua (PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, Papua)
- **Gambut:** pengembangan perkebunan di lahan gambut (PT Nabire Baru, Papua)
- **Eksplorasi:** pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dan menggunakan aparat keamanan negara untuk menghadapi perlawanan masyarakat lokal (PT Nabire Baru, Papua)

Goodhope Asia Holdings Ltd didirikan di Singapura dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Carson Cumberbatch Ltd Goodhope memiliki 15 anak perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua. Konsesi mencakup total 132.463 hektar. IOI Loders Crokiaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik Goodhope di Kalimantan untuk kilang di Amerika dan Belanda, melalui GAR dan Wilmar.

STUDI KASUS: PT NABIRE BARU, PAPUA BARAT

PT Nabire Baru mencakup luas 17.000 hektar. Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2013 beberapa ribu hektar hutan sebagian primer, termasuk hutan gambut, telah dibuka. Konsesi meliputi beberapa ribu hektar lahan gambut.

Pada pertengahan tahun 2016, deforestasi diyakini masih berlangsung, dengan citra satelit Landsat menunjukkan setidaknya 70% dari konsesi PT Nabire Baru ini dibuka atau dibagi-bagi menjadi blok perkebunan.

Terdapat perlawanan yang terus menerus terhadap operasi PT Nabire Baru oleh masyarakat adat lokal dari kelompok etnis Yerisiam, dimana kasus ini mendapatkan perhatian masyarakat yang cukup besar di Papua. PT Nabire Baru telah menggunakan satuan keamanan negara untuk menjaga keamanan perkebunan, dan ini telah mengakibatkan serangkaian kekerasan atau insiden-insiden intimidasi, yang sering dilaporkan ditargetkan pada anggota masyarakat yang menentang perkebunan.

Pada tanggal 12 April 2016 sengketa lanjutan muncul ketika perusahaan mulai membuka lahan untuk plasma (petani kecil), termasuk kebun sagu Jarae dan Manawari, yang merupakan situs suci bagi orang-orang Yerisiam serta menjadi sumber pangan penting. Konsesi ini sekarang sedang menjadi subyek komplain kepada RSPO.

PERNYATAAN IOI

“Berdasarkan informasi yang disediakan Greenpeace, kami sudah menghubungi pemasok ketiga dan meminta secepatnya perkembangan informasi terkait dengan tuduhan ini. Beberapa pemasok sudah menyediakan informasi bagaimana mereka berurusan dengan [Goodhope].”

PERNYATAAN PEDAGANG

Dalam email kepada Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, GAR dan Wilmar menegaskan bahwa mereka masih melanjutkan hubungan komersial dengan Goodhope.

PERNYATAAN PERUSAHAAN

Greenpeace menghubungi Goodhope sebelum publikasi untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuan. Goodhope mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk Nol Deforestasi dan Gambut, tapi tidak menjawab pertanyaan terkait dengan pedagang langsung juga tidak menanggapi tuduhan pembukaan hutan primer. Perusahaan memberikan dokumen penilaian penanaman baru “New Planting Assessment” yang digunakan pada tahun 2011 yang menunjukkan tidak ada gambut di area yang akan dibangun kebun, tapi mencatat bahwa survei yang lebih rinci akan mengikuti. Terkait dengan FPIC, perusahaan memberikan prosedur FPIC mereka, yang memasukan kerjasama dengan pihak netral yang independen termasuk politisi lokal, pemerintah daerah, kepolisian daerah dan satuan militer; hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dan kriteria RSPO.

Perusahaan mencatat bahwa terdapat surat dari pemerintah baru-baru ini mengenai keterbukaan yang memungkinkan kerahasiaan peta dan lokasi geo-referensi.



TOP: 12 MAY 2016 © YERISIAM MIDDLE: 1 MAY 2016 © YERISIAM BOTTOM: 13 OCTOBER 2008 © RANTE/GREENPEACE

KELOMPOK 4: INDOFOOD/SALIM GROUP (INDONESIA, ANGGOTA RSPO)

PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** pembukaan hutan yang cukup besar pada 2013–2014, termasuk 1.000ha hutan primer; peringatan berbasis satelit menunjukkan pembukaan hutan aktif berlanjut pada tahun 2016 (Isyue Makmur/Kedang Makmur, Kalimantan Timur)
- **Gambut:** kemungkinan deforestasi di lahan gambut (Isyue Makmur/Kedang Makmur, Kalimantan Timur)
- **Kebakaran:** kebakaran merajalela selama tahun 2014 dan 2015, termasuk di kawasan hutan primer yang telah terbuka (Isyue Makmur/Kedang Makmur, Kalimantan Timur)
- **Eksplorasi:** penggunaan buruh anak, pembayaran di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan (konsesi PT Lonsum, Sumatera Utara)

Indofood adalah salah satu penanam kelapa sawit terbesar di dunia dan perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Cabang minyak sawit dari Indofood, Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri), adalah perusahaan minyak sawit swasta terbesar ketiga di Indonesia. Perkebunannya mencakup total luas 246.000 hektar di Sumatra dan Kalimantan.

Operasi bisnis minyak kelapa sawit IndoAgri ini dilakukan oleh anak perusahaan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Salim Ivomas).

IOI Loders Crocklaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari 12 pabrik pengolah Salim Grup/ Indofood/IndoAgri, termasuk konsesi dalam salah satu studi kasus kami, melalui unit perdagangan Musim Mas.



STUDI KASUS: KONSESI ISYUE MAKMUR/ KEDANG MAKMUR, KALIMANTAN TIMUR

4.600ha hutan termasuk 1.000ha hutan primer dibuka di konsesi ini selama tahun 2013 dan 2014. Peringatan deforestasi berbasis satelit menunjukkan pembukaan masih berlangsung di konsesi pada tahun 2016. Dalam konsesi terdapat lebih dari 100 titik api selama 2015, termasuk dalam kawasan hutan primer yang dibuka.

STUDI KASUS: KONSESI PT LONSUM, SUMATERA UTARA

Rainforest Action Network, organisasi advokasi hak-hak buruh Indonesia OPPUK dan International Labor Rights Forum mendokumentasikan pekerja anak, paparan pestisida yang sangat berbahaya, pembayaran di bawah upah minimum, ketergantungan jangka panjang pada pekerja sementara untuk mengisi pekerjaan inti, dan penindasan kegiatan serikat buruh independen di dua perkebunan PT Lonsum di Sumatera Utara. Pelanggaran serupa ditemukan dalam suatu Penilaian Kepatuhan RSPO di perkebunan ketiga milik Lonsum.

PERNYATAAN IOI

'[Indofood] sudah dilaporkan dalam daftar komplain pemasok ketiga yang diawasi oleh departemen keberlanjutan kami. Kami juga telah meminta perkembangan terbaru dari pihak pemasok kami terkait dengan itu.'

PERNYATAAN PEDAGANG

Dalam email kepada Greenpeace, Musim Mas dan Wilmar belum mengindikasikan bahwa mereka telah menanggapi perdagangan dengan Indofood. Keduanya mengatakan mereka telah menghubungi manajemen Indofood.

PERNYATAAN PERUSAHAAN

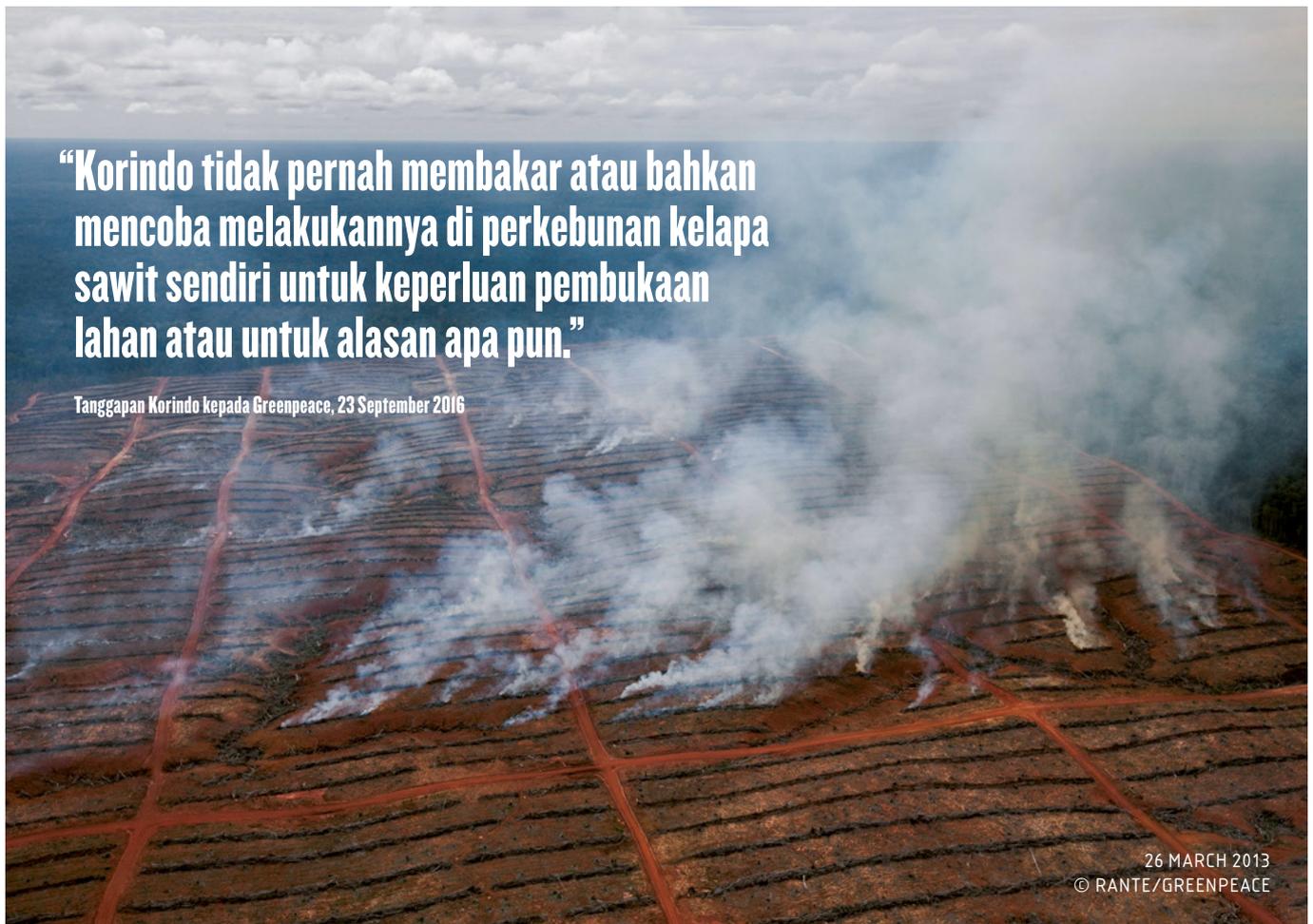
Greenpeace telah menghubungi Indofood sebelum publikasi untuk mendapatkan informasi terkait dengan temuan-temuan. Namun hingga waktu publikasi, Greenpeace belum menerima tanggapan dari perusahaan.

KELOMPOK 5: KORINDO (INDONESIA, NON-RSPO)



“Korindo tidak pernah membakar atau bahkan mencoba melakukannya di perkebunan kelapa sawit sendiri untuk keperluan pembukaan lahan atau untuk alasan apa pun.”

Tanggapan Korindo kepada Greenpeace, 23 September 2016



26 MARCH 2013
© RANTE/GREENPEACE

PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** 50.000 hektar hutan primer dan sekunder dibuka di konsesi Korindo di Papua
- **Kebakaran:** Penggunaan api untuk pembukaan lahan

Korindo adalah sebuah perusahaan swasta yang menerbitkan hanya sedikit informasi tentang keuangan maupun kepemilikan. Perusahaan ini dikendalikan oleh keluarga Seung Korea Selatan.

IOI Loders Croklaan membeli minyak sawit atau minyak inti sawit dari pabrik Korindo Tunas Sawa Erma 1A dan 1B di Papua melalui Wilmar dan Musim Mas.

STUDI KASUS: KONSESI DONGIN PRABHAWA, PAPUA

PT Dongin Prabhawa membuka hutan seluas 6.700 hektar pada periode 2011 hingga Mei 2016, 2.900 hektar di antaranya adalah hutan primer.

Titik api kebakaran di konsesi sejak 2013 menunjukkan bukti yang jelas bahwa Korindo menggunakan api untuk membersihkan tumbuhan pada lahan sebelum tanam. Secara total, 351 titik api tercatat di konsesi PT Dongin Prabhawa selama periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, hampir tidak ada kebakaran di kawasan hutan sekitar pengembangan perkebunan, dan juga tidak ada kebakaran di daerah yang sudah ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi hanya selama tahap pembukaan lahan.

STUDI KASUS: PAPUA AGRO LESTARI, PAPUA

PT Papua Agro Lestari hampir seluruhnya ditutupi oleh hutan primer pada tahun 2013, menurut peta tutupan lahan KLHK. Pada akhir 2015, sekitar 2.600ha hutan primer telah dibuka, dan 1.200ha lebih lanjut pada awal Juni 2016.

Pembukaan hutan yang disertai dengan pembakaran, dengan total 221 titik api kebakaran tercatat antara Agustus dan November 2015 – sebagian besar di antaranya terkonsentrasi di daerah yang baru dibuka di sudut barat laut dari konsesi. Pada tahun 2013 dan 2014, sebelum pengembangan lahan, tidak ada titik api tercatat di konsesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi hanya selama tahap pembukaan lahan, memberikan bukti bahwa perusahaan menggunakan api untuk membersihkan tumbuhan pada lahan sebelum menanam.

IOI menyatakan pada awal September 2016 bahwa pemasok pihak ketiga mereka telah 'memutuskan untuk menghentikan sementara memasok Korindo'. Keputusan ini (tidak oleh IOI sendiri, tapi pemasoknya) hanya diambil setelah terpapar di publik mengenai kegiatan Korindo, meskipun tuduhan dari sumber yang dapat dipercaya tentang perkebunan mereka di Papua telah berada dalam domain publik untuk waktu yang cukup lama.

PERNYATAAN IOI

'Pada Agustus 2016, pemasok kami memastikan bahwa mereka telah bekerjasama dengan Korindo dan memutuskan untuk menghentikan sementara pasokan dari Korindo. Sementara itu pihak ketiga kami akan terus terlibat dengan Korindo untuk membantu mereka mengadopsi dan melaksanakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebijakan para pemasok ketiga kami begitu juga dengan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan kami.'

PERNYATAAN PEDAGANG

Wilmar dan Musim Mas masing-masing menengguhkan pembelian dari Korindo pada bulan Juni dan Juli 2016.

PERNYATAAN PERUSAHAAN

Greenpeace menghubungi Korindo sebelum publikasi untuk mendapatkan konfirmasi atas temuan-temuan. Korindo memberi tanggapan yang sama dengan yang disampaikan kepada Aidenvironment dan Mighty terhadap publikasi mereka pada Agustus 2016. Korindo mengklaim sudah melaksanakan "No Deforestasi, No Gambut dan No Eksploitasi" dan berpegang pada regulasi pemerintah Indonesia termasuk kebijakan tanpa bakar. Perusahaan mengatakan: 'Korindo tidak pernah melakukan pembakaran atau bahkan mencoba melakukannya di perkebunan sawit sendiri untuk keperluan pembukaan lahan atau untuk alasan apa pun.'



KELOMPOK 6: TH PLANTATIONS/LEMBAGA TABUNG HAJI (MALAYSIA, NON-RSPO)



TH PLANTATIONS BERHAD

PELANGGARAN KEBIJAKAN IOI

- **Deforestasi:** peringatan deforestasi berbasis satelit menunjukkan pembukaan hutan dari awal tahun 2015 (PT Persada Kencana Prima, Kalimantan Utara)
- **Gambut:** pembukaan lahan gambut dalam di lanskap prioritas gambut (PT Persada Kencana Prima, Kalimantan Utara)

TH Plantations adalah unit perkebunan Lembaga Tabung Haji, Dana Haji Malaysia, badan investasi milik pemerintah yang dibentuk untuk memfasilitasi rakyat Malaysia menabung untuk melakukan ibadah haji.

IOI Loders Crocklaan membeli minyak sawit dan minyak inti sawit dari konsesi TH Plantations di Indonesia dan Malaysia, untuk kilang di Amerika Serikat, Belanda dan Malaysia; IOI membeli produk baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Wilmar.



STUDI KASUS: PERSADA KENCANA PRIMA, KALIMANTAN UTARA

Hampir seluruh konsesi seluas 11.000 ha berada di lahan gambut, termasuk gambut dalam yang luas. Sebagian besar konsesi dipetakan sebagai hutan sekunder pada tahun 2013. Peringatan deforestasi berbasis satelit menunjukkan pembukaan luas masih berlangsung di PT Persada Kencana Prima sejak awal 2015, dengan persiapan blok perkebunan yang jelas.

PERNYATAAN IOI

[TH Plantations] sudah dilaporkan dalam daftar komplain pemasok ketiga yang diawasi oleh departemen keberlanjutan kami. Kami juga telah meminta perkembangan terbaru pihak pemasok kami terkait dengan itu.' Kelompok IOI memang bersumber langsung dari TH Plantations. TH Plantations diklasifikasikan sebagai pabrik prioritas utama menindaklanjuti penilaian risiko dan kami sudah mendekati TH Plantations untuk verifikasi lapangan atas pabriknya. Sejauh ini TH Plantations menolak untuk bekerjasama. IOI akan terus terlibat dengan TH Plantations untuk mendesak kunjungan verifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah. Sementara ini kami akan melepaskan TH Plantations dari rantai pasok kami.'

PERNYATAAN PEDAGANG

Dalam email kepada Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, GAR, Musim Mas dan Wilmar semua mengkonfirmasi hubungan komersial masih berlanjut dengan TH Plantation.

KESIMPULAN: SAATNYA PEDAGANG BERTINDAK TERHADAP PEMASOK PIHAK KETIGA

Meskipun banyak komitmen untuk mengakhiri deforestasi dan menyelesaikan konflik, laporan ini memperlihatkan masih berlanjutnya masalah lingkungan dan sosial yang serius di pasokan minyak sawit global yang diperdagangkan IOI, termasuk oleh GAR, Musim Mas dan Wilmar. Tanggung jawab untuk perubahan ini terletak pada IOI dan para pedagang ini, yang gagal memonitor secara proaktif sumber pasokan mereka di tingkat kelompok perusahaan, atau mengeluarkan pemasok yang tidak patuh. Berdiam diri terhadap ini berarti pasar global minyak sawit terus memacu kerusakan hutan dan pelanggaran HAM.

Penting untuk dicatat bahwa proses RSPO tidak serta merta menjamin perusahaan anggota bebas dari deforestasi dan pembukaan gambut. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Indofood, di mana isu-isu perburuan mengerikan didokumentasikan di perkebunan yang bersertifikat RSPO, pembeli yang hanya berfokus pada pembelian pasokan bersertifikat RSPO tidak akan bisa melihat masalah sebenarnya. Lebih jauh, proses ini tidak melepaskan perusahaan dari tanggung jawab untuk menegakkan kebijakan mereka sendiri yang melampaui standar RSPO.

Sektor perkebunan di Indonesia harus dibuat lebih transparan. Banyak informasi yang sudah tersedia, termasuk analisis satelit untuk deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, dan peta konsesi terbaik seperti yang tersedia di website 'Kepo Hutan' Greenpeace. Namun, perusahaan tidak banyak mengetahui tentang operasi pemasok mereka sebagaimana seharusnya. Adalah kepentingan para perusahaan yang serius dengan keberlanjutan, untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil mendorong data kepemilikan lahan dan rantai pasokan ke dalam domain publik.

Tanggapan IOI atas masalah dengan para pemasoknya yang rinci dalam laporan ini mengindikasikan bahwa mereka terus mengalihkan tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah ini ke pedagang perantara, dan meminta mereka untuk mengatasinya atas nama IOI.



Satu-satunya pengecualian adalah hubungan IOI dengan TH Plantations yang dipasok secara langsung; IOI mengatakan "telah mendekati TH Plantations untuk verifikasi pabrik pengolah, tapi sejauh ini TH Plantations menolak untuk bekerjasama." Hal ini sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahannya, yaitu bahwa pelanggaran TH Plantations terhadap kebijakan keberlanjutan IOI bukanlah pada level pabrik dimana minyak dibeli, tapi pada tingkat kelompok perusahaan. Meskipun demikian IOI mengatakan "akan mengeluarkan TH Plantations dari rantai pasokan kami."

Pada akhirnya, solusi untuk minyak sawit, serta lingkungan dan para korban yang terkena dampak sektor ini, terletak pada tindakan bersama oleh industri. Perusahaan yang bertanggung jawab harus mulai bekerjasama dengan standar yang sama untuk mengidentifikasi dan tidak menyertakan pemain nakal yang terus menempatkan kehidupan manusia dan iklim pada risiko yang besar, dengan membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut dalam rantai pasokan mereka.

TUNTUTAN

IOI harus segera mengkaji ulang komitmen keberlanjutannya:

1. Melakukan penghentian perusakan hutan dan gambut di seluruh operasinya dan pemasok pihak ketiganya
2. Mempublikasikan rencana terikat waktu yang ambisius dengan batas waktu untuk verifikasi pemasok pihak ketiga untuk kepatuhan dan penghentian pemasok yang tidak patuh
3. Mengadopsi pendekatan lanskap yang nyata untuk memitigasi dampak operasinya pada hutan dan gambut, dimulai dari 4 konsesinya di Ketapang, Kalimantan Barat
4. Terlibat aktif dalam usaha restorasi hutan dan gambut yang ekstensif pada lanskap yang telah dirusak
5. Menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, termasuk menyelesaikan 6 tahun konflik dengan masyarakat Long Teran Kanan (LTK) di Sarawak dengan menghormati hak-hak mereka atas tanah adat mereka, yang harus ditentukan dengan pemetaan bersama masyarakat, dan menegosiasikan kembali akses perusahaan dan penggunaan lahan tersebut sesuai dengan FPIC dengan LTK dan masyarakat sekitarnya
6. Menghormati hak-hak pekerja dan mengatasi permasalahan eksploitasi dan perdagangan pekerja migran yang didokumentasikan dalam operasionalnya.
7. Memastikan laporan yang transparan yang didukung oleh audit independen terhadap perkembangan dan mempublikasikan peta konsesi, kajian HCS dan HCV, daftar lengkap pemasok serta pelaporan terhadap kepatuhan pemasok terhadap kebijakan IOI
8. Menunda kontrak dengan seluruh kelompok perusahaan yang ada dalam laporan ini sampai dengan adanya bukti kepatuhan dengan kebijakan NDPE

Untuk memastikan kelapa minyak sawit mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi, kebakaran hutan, degradasi lahan gambut atau pelanggaran hak asasi manusia, pedagang, produsen dan perusahaan pemroses harus:

1. **Segera menerapkan moratorium pada semua pengembangan dan ekspansi perkebunan.** Melakukan penilaian HCV dan HCS untuk mengidentifikasi dan melindungi semua hutan yang tersisa dan daerah penting secara sosial maupun ekologis lainnya. Mengharuskan semua pemasok pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama dan mengembangkan rencana terikat waktu yang ambisius untuk pentahapan pengeluaran pemasok yang tidak patuh.
2. **Memetakan semua lanskap lahan gambut yang terdampak oleh operasi mereka sendiri dan pemasok pihak ketiga** menggunakan teknologi yang tepat seperti LiDAR, dan membuat data ini tersedia untuk umum. Pembasahan kembali gambut dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan air lainnya untuk menjamin perlindungan hutan lahan gambut dan untuk mengurangi risiko kebakaran, berdasarkan pemetaan dan saran dari para ahli gambut independen.
3. Berkomitmen untuk membangun dan/atau berpartisipasi dalam **kemitraan multi-pihak** dalam lanskap hutan dan lahan gambut prioritas yang terdampak oleh rantai pasokan perusahaan.
4. **Mempublikasikan semua peta konsesi** untuk operasi mereka sendiri melalui pemantauan hutan secara online seperti Global Forest Watch dan sistem peringatan. Mengharuskan semua pemasok untuk mempublikasikan peta konsesi yang mencakup seluruh operasi mereka, memprioritaskan daerah-daerah berisiko tinggi, pada akhir 2016. Berkomitmen untuk memasukkan transparansi dalam klausul kontrak baru dan memulai pentahapan pengeluaran produsen yang tidak patuh.
5. Menggunakan data terbaik yang tersedia mengenai hutan Indonesia dan lahan gambut, termasuk peta konsesi, untuk **secara proaktif memonitor pemasok** di tingkat kelompok perusahaan. Mengidentifikasi kelompok prioritas dan memulai prosedur pengaduan untuk menyampaikan rencana aksi yang terikat waktu dari perusahaan-perusahaan ini. Mengecualikan perusahaan yang diketahui membuka hutan atau mengembangkan lahan serta merusak lahan gambut.
6. **Melibatkan auditor** untuk melakukan penilaian independen mengenai kondisi sosial dan tenaga kerja di konsesi kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. **Menyelesaikan komplain yang belum selesai** secara transparan untuk terpenuhinya kepuasan masyarakat lokal.
7. **Menunda kontrak** dengan seluruh kelompok perusahaan yang ada dalam laporan ini sampai dengan adanya bukti kepatuhan dengan kebijakan NDPE

GREENPEACE

27 September 2016
Published by Greenpeace International
www.greenpeace.org/costs-of-IOI